



Warga Kota Tunggak Pajak Rp 48 Miliar

Wawali: Tingkatkan Kesadaran Butuh Sinergi

JOGJA- Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang belum dibayarkan warga Kota Jogja tergolong lumayan tinggi. Selama tujuh tahun mulai 1994 sampai 2011 tunggakan PBB mencapai Rp 48 miliar.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono mengatakan, tingginya tunggakan itu menunjukkan kurang sadarnya masyarakat. Untuk menagih PBB yang belum dibayar itu pemkot akan terus menagih.

"Kami akan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak" ujar Kadri di Balai Kota Timoho, kemarin (16/5).

Selain itu, Kadri juga berencana melakukan verifikasi di 45 kelurahan se-Kota Jogja dalam rangka mengetahui secara pasti jumlah tunggakan di setiap kelurahan.

Sebab, ada wajib pajak sudah menyeter namun belum tercatat. Penerimaan PBB yang semula dikelola Kantor Pajak Pratama (KPP) Kementerian Keuangan RI dialihkan menjadi kewenangan pemkot.

Pemkot sudah memulai mengelola PBB sejak 2012. Rencananya, dalam verifikasi itu,



JADI TELADAN: Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono Dwi Putranto saat ikut membayar PBB dalam Pekan Panutan Pembayaran PBB 2013 di Pendopo Balai Kota Timoho, kemarin (16/5).

Kadri menggandeng KPP Pratama dan Pemprov DIJ.

Kadri menambahkan, untuk mendongkrak realisasi pembayaran PBB secara rutin akan menggelar pekan panutan pembayaran PBB. Adapun agenda kegiatan membayar PBB secara massal, ada 480 wajib pajak yang ikut. Di harapkan dengan adanya kegiatan ini mampu mendorong kesadaran masyarakat tertib membayar pajak.

DPDPK menargetkan realisasi PBB melalui kegiatan pekan panutan PBB sebesar Rp 4,2 miliar. Jumlah wajib pajak sendiri di Kota Jogja tercatat 90.900 orang dengan target pendapatan se-

besar Rp 39 miliar.

Wakil Wali Kota (Wawali) Jogja Imam Priyono Dwi Putranto mengatakan, keteladanan dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan. Inam dalam pembukaan acara pekan panutan pembayaran PBB 2013 langsung menyeterkan kewajibannya sebesar Rp 2.736.672.

"Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan Kota Jogja menjadi lebih baik," ucapnya.

Ia berharap kepada wajib pajak ikut memberikan kesadaran kepada masyarakat. Pemkot berharap ada sinergi antara pemkot dan masyarakat. (hrp/kus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005